

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN TINGGIRAN II.1 BARITO KUALA

Niken Dwi Safitri^{1*}, Ali Rachman², Mirnawati²

¹SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala

²Program Studi Pendidikan Khusus FKIP Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding Author: nikendwisafitri6@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif pada ranah (a) perencanaan pembelajaran, (b) pelaksanaan pembelajaran, dan (c) evaluasi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 orang yaitu guru kelas II dan guru kelas VI. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sedangkan teknik keabsahan datanya adalah *membercheck* dan ketekunan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru kelas SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala pada tahap (a) perencanaan pembelajaran tidak melakukan asesmen dan tidak membuat program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini karena belum tersedianya guru pembimbing khusus dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh guru kelas, sehingga dalam merencanakan pembelajaran guru kelas hanya berpatokan pada pengetahuan yang diperoleh dari pihak kabupaten mengenai dasar-dasar cara menangani siswa berkebutuhan khusus. Pada tahap (b) pelaksanaan pembelajaran guru kelas SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala menggunakan metode, media, dan materi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, pada (c) evaluasi pembelajaran guru kelas SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala juga melakukan modifikasi pada bentuk soal, perintah, bobot, dan standar KKM yang lebih disederhanakan menyesuaikan dengan kemampuan setiap siswa berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Implementasi, pendidikan inklusif

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusif menurut Direktorat Pembinaan SLB 2007 dalam Garnida (2015) adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak tidak terkecuali siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masing-masing siswa sehingga potensinya dapat berkembang secara optimal. Sedangkan menurut Kustawan (2012) pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan inklusif masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Seperti halnya hasil penelitian Tarnoto (2016) yang menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inklusi, kurangnya keterlibatan dari semua pihak (akademisi, tenaga ahli, guru, sekolah, orangtua, dan pemerintah) terkait pelaksanaan sekolah inklusi.

Berbagai permasalahan yang muncul bila dikaji lebih lanjut akan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik dari guru, siswa, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di sekolah inklusif adalah guru yang mengeluh karena kurang kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru tentang siswa berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi yang kemudian berdampak pada permasalahan yang muncul selanjutnya yaitu guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa ada beberapa guru memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang secara tidak langsung memberi dampak pada bagaimana guru menangani siswa berkebutuhan khusus menjadi tidak maksimal.

SDN Tinggiran II.1 merupakan salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017, namun hingga sekarang masih belum memiliki tenaga pendidik yang berlatarbelakang Pendidikan Khusus atau biasa disebut GPK. Selain itu, lokasi sekolah yang berada jauh dari pusat kota juga mengakibatkan informasi yang diperoleh mengenai pelayanan untuk siswa berkebutuhan khusus sedikit terlambat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam menjalankan perannya sebagai sekolah inklusif yang masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, dan kredibel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 orang yaitu guru kelas II dan guru kelas VI. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sedangkan teknik keabsahan datanya adalah *membercheck* dan ketekunan pengamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala

Penelitian yang telah dilakukan di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala menunjukkan bahwa dari segi perencanaan pembelajaran guru kelas tidak melakukan asesmen, mereka hanya melihat perkembangan perilaku siswa berkebutuhan khusus saja tanpa melihat kemampuan, hambatan, dan kebutuhan masing-masing siswa berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Padahal asesmen ini sangat penting dan menjadi landasan awal untuk memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Yuwono (2015) bahwa asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan dimana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak sehingga seorang guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis dan objektif sesuai dengan kenyataan anak tersebut.

Akibat dari tidak dilakukannya asesmen, maka program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut pun tidak dibuat oleh guru kelas. Selain karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh guru kelas, tidak tersedianya guru pembimbing khusus juga menyulitkan guru kelas dalam membuat program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Tinggiran II.1 dari segi perencanaan pembelajaran sudah terlaksana cukup baik. Walaupun guru kelas tidak melakukan asesmen kepada siswa berkebutuhan khusus, tapi setidaknya guru tersebut sudah mengetahui dasar-dasar cara penanganan siswa berkebutuhan khusus dari pihak kabupaten. Selain itu, belum tersedianya guru pembimbing khusus dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh guru kelas juga membuatnya tidak membuat program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus.

3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala

Saat proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala, guru kelas menggunakan metode pembelajaran individual kepada siswa berkebutuhan khusus yang dilakukan setelah guru kelas selesai menjelaskan dan memberi tugas pada siswa reguler. Pendekatan individual ini sangat cocok untuk siswa berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik berbeda dari siswa reguler, baik dari segi minat, bakat, kecerdasan, dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kurniati (2013) bahwa dengan adanya pendekatan individual ini diharapkan siswa berkebutuhan khusus dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah inklusi. Selain itu, pendekatan ini juga berorientasi pada siswa dan pengembangan diri siswa yang dapat membantu siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dengan jumlah siswa yang banyak dan kemampuannya yang heterogen.

Materi yang disampaikan oleh guru kelas kepada siswa berkebutuhan khusus sama dengan anak pada umumnya, namun lebih disederhanakan menyesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Dengan demikian, guru kelas telah melakukan modifikasi pada materi sesuai dengan pernyataan Maghfiroh (2013) bahwa modifikasi adalah merubah kurikulum (materi) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Guru kelas juga menggunakan media buku dan kartu gambar untuk membantu dan memudahkan siswa berkebutuhan khusus dalam memahami pelajaran yang awalnya abstrak menjadi lebih nyata. Selain itu, penggunaan media juga dapat menarik perhatian siswa berkebutuhan khusus dan menumbuhkan semangatnya dalam proses pembelajaran hal ini seperti yang diungkapkan oleh Karo dan Rohani (2018) bahwa manfaat media pembelajaran yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, interaktif, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pelaksanaan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala sudah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan penggunaan metode pembelajaran individual yang menyesuaikan dengan hambatan siswa, penggunaan media untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran, dan pemberian materi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maghfiroh (2013) bahwa pembelajaran dalam *setting* inklusif ada beberapa model salah satunya adalah modifikasi yang berarti merubah kurikulum (materi, metode, dan media) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus.

3.3 Evaluasi Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala

Selain pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala juga sudah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan adanya modifikasi pada bentuk soal, perintah, bobot, dan standar KKM untuk siswa berkebutuhan khusus yang lebih disederhanakan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, waktu untuk siswa berkebutuhan khusus menjawab soal juga lebih lama dan lebih fleksibel dibandingkan siswa reguler. Dengan demikian modifikasi yang dilakukan oleh guru kelas pada proses penilaian sudah terlaksana sesuai dengan pernyataan Matluhatin (2014) mengenai beberapa cara dalam melakukan penilaian terhadap siswa berkebutuhan khusus dalam *setting* inklusif salah satunya adalah menggunakan sistem penilaian yang dimodifikasi seperti pada bentuk soal, jumlah soal, waktu, dan teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, tugas guru kelas di sekolah inklusif pada ranah evaluasi juga terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas utama guru kelas dalam *setting* inklusif salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2011).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Tinggiran II.1 Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

- 4.1** Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru kelas tidak melakukan asesmen dan tidak membuat program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus.
- 4.2** Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru kelas menggunakan metode, media, dan materi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
- 4.3** Pada tahap evaluasi pembelajaran, guru kelas melakukan modifikasi pada bentuk soal, perintah, bobot, dan standar KKM yang lebih disederhanakan menyesuaikan dengan kemampuan setiap siswa berkebutuhan khusus.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Karo, Isran Rasyid dan Rohani. 2018. Manfaat Media dalam Pembelajaran. *Jurnal Axiom*, 7 (1): 91-96.
- Kurniati, Ana. 2013. Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Individual Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Difabel (Tunanetra) di MAN Maguwoharjo. *Jurnal Citizenship*, 3 (1): 41-56.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima.
- Maghfiroh, Muliatul. 2013. *Pengembangan Kurikulum Model DMSO (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi, Omisi) dan Implementasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Galuh Handayani (Penyelenggara Pendidikan Inklusif)*. Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Matluhatin, Lilik. 2014. Evaluasi Pembelajaran Siswa berkebutuhan khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang. *Jurnal Studi Islam*, 5 (2): 201-227.

Tarnoto, Nissa. 2016. Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Pada Tingkat SD. *Jurnal Humanitas*, 13 (1): 45-62.

Yuwono, Imam. 2015. *Identifikasi dan Asesmen Siswa berkebutuhan khusus Setting Pendidikan Inklusif*. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Surabaya:UNESA

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan